

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Menurut Moleong (2017) landasan teori merupakan himpunan konsep-konsep yang disusun secara sistematis sebagai hasil dari proses abstraksi pemikiran, yang berfungsi sebagai landasan atau acuan dalam memahami dan menarik kesimpulan atas berbagai dimensi dalam penelitian. Dalam setiap kegiatan penelitian, keberadaan pemikiran teoritis tidak dapat dipisahkan, karena teori memiliki keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi dengan seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis dan penyusunan konstruksi hasil penelitian. Dengan kata lain, teori berperan sebagai fondasi intelektual yang membantu peneliti menjelaskan fenomena yang diteliti secara logis dan terstruktur, serta memberikan arah yang jelas dalam proses interpretasi data. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Sistem Pengadaan

Menurut Siahaya (2016), pengadaan merupakan serangkaian langkah yang dilakukan secara terencana, logis, dan sistematis untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau instansi. Proses ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, integritas, serta norma hukum yang

berlaku. Setiap tahapan pengadaan mengacu pada metode dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai pedoman resmi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan mengikuti panduan tersebut, proses pengadaan diharapkan mampu menciptakan nilai optimal serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup berbagai tahapan mulai dari pencatatan master data, pengajuan permintaan pembelian (*purchase request*), pemilihan vendor yang sesuai, hingga pelaksanaan pembelian itu sendiri. Setelah proses pembelian dilakukan, langkah berikutnya adalah pemantauan terhadap status pesanan (*order monitoring*), penerimaan barang atau jasa, serta verifikasi dokumen tagihan (*invoice*) oleh bagian keuangan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran. Seluruh proses ini kemudian diakhiri dengan pelaporan oleh bagian pembukuan. Keseluruhan siklus tersebut idealnya dijalankan menggunakan sistem yang terintegrasi, sehingga dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan akurasi data dalam setiap tahap pengadaan. Integrasi sistem juga memungkinkan koordinasi antarbagian menjadi lebih efektif, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan (Utojo, 2019).

Menurut Siahaya (2016) terdapat sejumlah fungsi yang saling mendukung dalam upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Setiap fungsi memiliki karakteristik dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda, tergantung pada strategi, kebutuhan, serta kondisi organisasi atau instansi yang bersangkutan. Secara umum, fungsi-fungsi dalam pengadaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Pembelian (*Purchasing*), yakni merupakan metode pengadaan yang paling umum, di mana barang atau jasa diperoleh melalui transaksi pembelian dari pihak ketiga, baik vendor maupun penyedia jasa, dengan proses yang mengikuti prosedur administrasi dan evaluasi tertentu.
2. Swakelola (*Self Management*), yakni pengadaan dilakukan secara mandiri oleh instansi atau unit kerja tanpa melalui pihak ketiga, biasanya ketika barang/jasa tersebut dapat diproduksi atau disediakan langsung oleh internal organisasi.
3. Tukar Tambah (*Trade-in*), yakni metode pengadaan di mana barang lama ditukar dengan barang baru dari penyedia, disertai pembayaran selisih nilai. Fungsi ini sering digunakan untuk barang yang memiliki nilai sisa pakai, seperti kendaraan atau perangkat teknologi.
4. Beli Kembali oleh Pabrik (*Factory Buy-back*), yakni skema pengadaan di mana pihak pabrik atau produsen membeli kembali barang lama yang telah digunakan, biasanya sebagai bagian dari kesepakatan awal pembelian barang baru.
5. Barter (*Exchange*), yakni roses pengadaan yang dilakukan tanpa transaksi uang tunai, melainkan melalui pertukaran barang atau jasa antara dua pihak berdasarkan kesepakatan nilai yang setara.

2.1.1.1 Prinsip Pengadaan

Dikutip dari Perpres 16 Tahun 2018 dalam Siahaya (2016) Prinsip-prinsip pengadaan (*Procurement Principles*) merupakan landasan fundamental

yang harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh tahapan proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian kegiatan. Tujuan penerapan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa proses pengadaan berjalan secara efisien, efektif, adil, dan bertanggung jawab, serta menghasilkan nilai maksimal bagi organisasi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Efisien

Pengadaan harus dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya, anggaran, waktu, dan fasilitas secara optimal. Proses pengadaan diarahkan agar mampu mencapai target kualitas dan waktu yang telah ditetapkan melalui penyederhanaan prosedur dan percepatan pelaksanaan, tanpa mengabaikan standar mutu.

2. Efektif

Kegiatan pengadaan harus berdasarkan pada kebutuhan nyata dan riil, dengan fokus pada hasil yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi. Efektivitas juga mencakup pencapaian kinerja yang optimal dan hasil akhir yang berkualitas.

3. Adil

Setiap pelaku usaha yang terlibat dalam proses pengadaan harus diperlakukan secara setara. Tidak boleh ada perlakuan khusus yang mengarah pada diskriminasi atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Kesempatan yang sama harus diberikan kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan.

4. Transparan

Proses pengadaan wajib terbuka dan dapat diakses informasinya oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum. Keterbukaan informasi ini meliputi ketentuan, kriteria, tahapan, dan hasil pengadaan, guna mencegah kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik.

5. Bersaing

Pengadaan harus mendorong adanya kompetisi yang sehat antar penyedia barang/jasa. Kesempatan berpartisipasi harus diberikan kepada seluruh penyedia yang memenuhi kualifikasi, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak manapun yang dapat mengganggu keadilan proses.

6. Akuntabel

Setiap kegiatan pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait, baik secara administratif maupun hukum. Pertanggungjawaban ini mencakup pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip, kebijakan, norma, dan ketentuan yang berlaku.

7. Berwawasan Lingkungan

Proses pengadaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Pengadaan barang, jasa, maupun pelaksanaan pekerjaan diupayakan tidak menimbulkan risiko lingkungan atau dampak negatif terhadap keberlanjutan ekosistem.

2.1.1.2 Tujuan dan Peran Pengadaan

Menurut Utojo (2019) tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengadaan adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara efisien, transparan, serta memberikan manfaat optimal bagi organisasi dan masyarakat. Tujuan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, tetapi juga mencakup aspek strategis, sosial, dan hukum. Secara garis besar, tujuan pengadaan yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan keterpaduan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan memastikan bahwa barang atau jasa yang diperoleh memiliki kualitas yang sesuai, jumlah yang tepat, berasal dari sumber yang terpercaya, tersedia pada waktu dan tempat yang dibutuhkan, serta diperoleh dengan biaya yang seoptimal mungkin.
2. Menghadirkan sistem pengadaan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan usaha lokal, dan penciptaan peluang ekonomi.
3. Mengembangkan sistem pengadaan yang bersifat strategis dan berorientasi pada hasil, artinya proses pengadaan dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimal.
4. Memberikan akses terbuka kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengadaan, khususnya dalam memberikan informasi, masukan, atau pengawasan, guna mewujudkan tata kelola pengadaan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip serta regulasi yang berlaku.

5. Menyediakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan, termasuk kepastian berusaha bagi penyedia barang dan jasa, sehingga tercipta iklim pengadaan yang adil, tertib, dan dapat dipercaya.

Pengadaan memiliki peran penting sebagai suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk menentukan berbagai aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Proses ini mencakup identifikasi atas apa yang akan diadakan, termasuk spesifikasi teknis dan standar kualitas yang dibutuhkan; kapan waktu yang tepat untuk pengadaan dilakukan, baik dari sisi jadwal maupun waktu pengiriman; bagaimana cara memperoleh barang atau jasa tersebut, termasuk pemilihan metode dan sumber pengadaan; serta berapa jumlah atau kuantitas yang diperlukan. Seluruh tahapan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan maupun pengguna akhir, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya, ketepatan waktu pengiriman, serta kesesuaian antara kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengadaan tidak hanya sekadar proses administratif, melainkan merupakan bagian strategis yang menjamin bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan dapat tersedia secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat biaya. Pelaksanaan pengadaan yang terencana dan terkendali secara sistematis akan mendukung kelancaran operasional organisasi dan meningkatkan kepuasan para pemangku kepentingan (Utojo, 2019).

2.1.1.3 Indikator Pengadaan

Dikutip dari procurement.id indikator kinerja utama atau *Key Performance Indicators (KPI)* terbagi menjadi 9 bagian, yaitu Waktu Siklus Pengadaan (*Procurement Cycle Time*), Efisiensi Biaya (*Cost Efficiency*), Kualitas Pengadaan (*Procurement Quality*), Ketepatan Pengiriman (*On-Time Delivery Rate*), Kinerja Vendor (*Supplier Performance*), Tingkat Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*), Jumlah Penyedia yang Berpartisipasi (*Number of Bidders*), Rasio Penghematan Anggaran (*Budget Compliance Rate*), Rasio Penggunaan E-Procurement (*E-Procurement Utilization Rate*). Namun, yang peneliti gunakan sebagai indikator dalam penelitian ini hanya sebagiannya saja dan indikator ini peneliti lakukan penyesuaian sesuai dengan fokus permasalahan yang terjadi di CV Rieltech Edukasi Nusantara serta keterbatasan data yang tersedia di lapangan. Adapun indikator pengadaan barang yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu barang diterima, mencakup kecepatan dan ketepatan dalam pemenuhan *purchase order (PO)* baik untuk barang *ready stock* maupun barang *indent*.
2. Kesesuaian kuantitas dan spesifikasi barang, mencakup kecocokan jumlah serta kesesuaian jenis barang dengan kebutuhan yang dipesan.
3. Ketepatan kualitas barang, mencakup kondisi barang saat diterima, tingkat retur, serta penerapan *quality control*.

4. Ketepatan kelengkapan barang, mencakup kelengkapan barang sesuai daftar pesanan dan minimnya kesalahan administrasi seperti input data pemesanan.

